

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kalijodo adalah lingkungan prostitusi dan perjudian di daerah Penjaringan, Jakarta Utara yang sudah berdiri lama. Awal mula Kalijodo merupakan tempatnya para pemuda Tiongkok di era 1930-an mencari Jodoh (Warta Kota,11/2/2016). Kalijodo berawal dari masyarakat berlatar etnis Tionghoa yang melarikan diri dari Manchuria wilayah yang dulunya terletak di dekat perbatasan Korea Utara dan Rusia, saat melarikan diri ke Batavia, mereka tidak membawa istri, sehingga mereka akhirnya mencari gundik atau selir pengganti istri di Batavia. Dalam proses mencari selir, mereka kerap bertemu di kawasan bantaran sungai, lalu tempat itu dinamakan Kalijodo, dalam bahasa Jawa Kalijodo artinya “sungai bertemunya jodoh”(www.idntimes.com/sejarah-berdirinya-kalijodo) (15/8/16).

Saat ini Kalijodo terkenal dengan tempat prostitusi dan perjudian bergaya mewah, seperti yang dikutip Surat Kabar Warta Kota, 11 Februari 2016. “Menurut buku “Geger Kalijodo” Karya Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Krishna Murti , saat ia menjadi Kapolsekro Metro Penjaringan tahun 2002 perputaran uang dari lapak-lapak judi Kalijodo mencapai Rp.500 Juta sehari dan saat ini tahun 2016 perputaran uang setiap harinya Rp 1 - Rp 1,5 Miliar perharinya. (Warta Kota, 11/2/16).

Februari 2016 lalu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk menertibkan kawasan Prostitusi dan Perjudian Kalijodo, dikarenakan Pemerintah menargetkan pada tahun 2017 kawasan tersebut sudah berubah menjadi kawasan

hijau dan tidak ada lagi bangunan liar berdiri. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta 2010-2030, Kalijodo tercatat sebagai ruang terbuka hijau. Tahun 2001 lalu sebetulnya Kalijodo pernah dilakukan penertiban, tapi karena tidak ada solusi yang berkelanjutan akhirnya Kalijodo kembali tumbuh seperti sediakala, dan kali ini gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama berencana menertibkan kembali kawasan tersebut dan membuat Kalijodo menjadi ruang terbuka hijau dan tidak ada lagi bangunan liar.

Penertiban lokasi prostitusi dan perjudian Kalijodo yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta mendatangkan *Pro* dan *Kontra* di kalangan masyarakat dan aparat Pemerintah. Sikap *kontra* diperlihatkan oleh masyarakat yang tinggal di lingkungan Kalijodo serta mendapat kecaman keras dari pekerja di kawasan tersebut. Pekerja seks komersial (PSK) tidak terima dan tidak tinggal diam atas penertiban tempat kerja mereka. “Ahok tuh bisanya hanya memiskinkan warganya saja, saya tinggal disini dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saya warga DKI, disini mah saya bisa dapat duit banyak mas Rp 3-5 Jutaan, kalau dikasih kerjaan sama Ahok, kerjaan apaan? Ngejahit kain? Tukang sampah? Ngak mau saya. Ucap salah seorang pekerja di Kalijodo pada Warta Kota, 15 Februari 2016. Ada juga yang mengancam Ahok untuk tidak membangunkan macan tidur. “Berani usik orang sini mas, habis sudah. Itu sama saja bangunin macan tidur. Aneh-aneh saja. Intinyakan kita tidak merusak lingkungan iyakan? Ga bikin sampah. Dia (Ahok) aja yang ribet”. Ujar salah satu warga Kalijodo (Warta kota, 10 Februari 2016).

Tidak hanya tanggapan menolak yang mewarnai kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam menertibkan kawasan prostitusi dan perjudian Kalijodo. Sikap mendukung langkah tersebut juga ditunjukkan beberapa pihak agar kawasan tersebut ditertibkan dan dijadikan sebagai ruang terbuka hijau. “Kami akan lakukan penegakan hukum dimanapun termasuk di Kalijodo, jika kami temukan pelanggaran hukum akan kami tindak,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Muhammad Iqbal, (Pos Kota, 15/2). “Kami jajaran Kecamatan dan kelurahan mendukung rencana Ahok. Tentunya dengan walikota sebagai pengendali wilayah” ucap Abdul Camat Penjaringan, Jakarta Utara. (Pos Kota, 15 Februari 2016).

Intensifnya pemberitaan memunculkan beragam pandangan atas berita tersebut, karena Kalijodo merupakan tempat prostitusi yang sudah berdiri lama di daerah Jakarta. Selama ini terkesan jauh dari sentuhan aparat. Mempunyai nilai berita yang tinggi dikarenakan Jakarta merupakan pusat Pemerintahan di Indonesia. Hampir seluruh surat kabar memasang *headline* berita mengenai penertiban yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta terhadap Lokasi Prostitusi dan Perjudian Kalijodo, tindakan tersebut merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama.

Pemberitaan mengenai penertiban Kalijodo banyak diperbincangkan di media khususnya surat kabar, seolah ingin secepatnya dalam menerbitkan pemberitaan mengenai Penertiban Prostitusi dan Perjudian Kalijodo yang sedang menjadi isu nasional. Perkembangan media massa khususnya media cetak begitu pesat. Media berfungsi menyambung komunikasi antar individu maupun kelompok. Proses kelahiran media massa dimulai dari kebutuhan masyarakat

untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Banyaknya jenis media massa menjadikan pilihan untuk mendapatkan informasi ataupun hiburan dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Sam Abede Pareno pada buku Media Massa: Antara Realitas dan Mimpi. Dalam berbagai wacana tentang fungsi media massa disebutkan 4 fungsi media massa yaitu fungsi penyalur informasi, fungsi mendidik, fungsi menghibur dan fungsi mempengaruhi. Keempat fungsi tersebut melekat dalam media massa secara utuh, dalam arti harus dilaksanakan secara bersama-sama. Tidak boleh mengutamakan satu atau dua fungsi tapi mengabaikan fungsi-fungsi lainnya. Ketika media massa melakukan fungsi penyalur informasi, tentu dilarang keras meninggalkan fungsi pendidik dan fungsi-fungsi lainnya. Dengan demikian fungsi media massa sesungguhnya hanya satu fungsi namun dipilah-pilah menjadi empat fungsi; dengan kata lain fungsi media massa adalah *four in one function*. (Media Massa: Antara Realitas dan Mimpi, 2005:7)

Dari definisi di atas dapat disimpulkan fungsi media massa termasuk didalamnya adalah media cetak yaitu bukan hanya sekedar pemberi informasi, tetapi juga sebagai pendidik, menghibur, dan juga mempengaruhi. Keempat fungsi tersebut saling berkaitan, tidak bisa jika hanya disebutkan salah satu saja. Pemberi informasi maksudnya adalah media massa sebagai alat atau perantara antara satu individu atau kelompok untuk mendapatkan informasi ataupun untuk menyebarluaskan informasi yang dimiliki. Fungsi pendidik maksudnya adalah adanya media massa berfungsi memberikan pendidikan kepada masyarakat sekaligus memberikan pengetahuan dalam bidang ekonomi,

politik maupun sosial. Fungsi menghibur yaitu media menyajikan hiburan disaat masyarakat penat akan kesibukannya, media massa hadir sebagai penyalur hiburan. Yang terakhir yaitu fungsi mempengaruhi yaitu media dapat memengaruhi sikap seseorang yang awalnya netral agar mengikuti kehendak pihak tertentu.

Lain media lain pemberitaan, setiap media mempunyai pandangan tersendiri dalam menulis dan menanggapi suatu berita. Begitu pula pada pemberitaan mengenai penertiban yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta terhadap lokasi prostitusi dan perjudian Kalijodo. Pada penelitian ini penulis memilih menganalisa media Surat Kabar Pos Kota dan Warta Kota, penulis memilih dua media yang berbeda karena penulis ingin melihat bagaimana dua media yang berbeda membingkai berita yang sama yaitu mengenai pemberitaan Penertiban Prostitusi dan Perjudian Kalijodo oleh Pemprov DKI Jakarta. Surat kabar Pos Kota dan Warta Kota dipilih penulis karena jika dilihat dari keberadaan geografisnya kedua media tersebut berpusat di Jakarta, yang sebagaimana diketahui Kalijodo berada di daerah Jakarta. Selanjutnya surat kabar Pos Kota dan Warta Kota merupakan Surat Kabar regional yang besar peredarannya pada daerah Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, dan sekitarnya, dan merupakan surat kabar yang memfokuskan pada pemberitaan di daerah Jakarta.

Media cetak ataupun surat kabar berhak membingkai atau mengemas berita sesuai dengan ideologi atau kebijakan dari media tersebut, jika dilihat dan dilakukan penelitian, surat kabar Pos Kota berlandaskan ideologi Pancasila yang berarti kesejahteraan sosial dan keadilan sosial, hal tersebut berdasarkan

wawancara mendalam yang telah dilakukan penulis kepada pemimpin Redaksi Pos Kota Bpk. H. Toto Irianto, Selasa (19/7) yang mengatakan “secara umum kebijakannya (Pos Kota) mengacu kepada Pancasila, kesejahteraan sosial dan keadilan sosial”. Begitu pula dengan surat kabar Warta Kota, setelah penulis lakukan penelitian dan wawancara kepada *news manager* Warta Kota, Bpk Tri Broto, Senin (25/7) “ideologi atau kebijakan yang dimiliki surat kabar Warta Kota yaitu berlandaskan atas etika jurnalistik dan undang-undang pers yang berlaku, sebisa mungkin mengeluarkan berita yang berimbang disetiap pemberitaannya”.

Pembingkaihan berita yaitu bagaimana seorang wartawan atau media mengemas sebuah peristiwa untuk menghasilkan opini publik yang disebut juga dengan *framing*. Dalam ranah studi komunikasi, *framing* mewakili tradisi yang mengedepankan pendekatan atau perspektif multidisipliner untuk menganalisis fenomena atau aktivitas komunikasi (Sobur, 2015:162). Dalam perspektif komunikasi, analisis framing dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan dan pertautan fakta kedalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti, atau lebih diingat, untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, serta hendak dibawa kemana berita tersebut (Nugroho, Eriyanto, Surdiansis, 1992:21) dalam (Sobur, 2015:16). Definisi tersebut menjelaskan bagaimana media membuat berita dari suatu kejadian atau peristiwa tidak luput dari ideologi media yang tujuannya adalah menggiring interpretasi halayak sesuai dengan perspektif media.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini memfokuskan menganalisa pembingkai berita penertiban terhadap lokasi prostitusi dan perjudian Kalijodo oleh Pemprov DKI Jakarta, di surat kabar Pos Kota dan surat kabar Warta Kota edisi Februari 2016, karena pada bulan Februari Pemerintah mulai memfokuskan penertiban Kalijodo dan media ramai memperbincangkan.

## 1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini difokuskan untuk mengetahui, bagaimanakah Surat Kabar Pos Kota dan Surat Kabar Warta Kota membingkai berita mengenai penertiban lokasi prostitusi dan perjudian Kalijodo oleh Pemprov DKI Jakarta?

Dengan demikian penulis menggunakan judul “Analisis pembingkai berita tentang penertiban lokasi prostitusi dan perjudian Kalijodo oleh Pemprov DKI Jakarta di surat kabar Pos Kota dan Warta Kota, (edisi Februari 2016)”.

## 1.3 Pertanyaan penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka pertanyaan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana *framing* pemberitaan yang dilakukan surat kabar Pos Kota dan Warta Kota dalam membingkai pemberitaan mengenai penertiban lokasi prostitusi dan perjudian Kalijodo oleh Pemprov DKI Jakarta dilihat dari struktur Sintaksis, Skrip, Tematik, dan Retoris pada kerangka *framing* model Pan dan Kosicki?

2. Apakah ideologi mempengaruhi objektivitas pemberitaan mengenai penertiban lokasi prostitusi dan perjudian Kalijodo oleh Pemprov DKI Jakarta di surat kabar Pos Kota dan Warta Kota?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis dalam melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui gambaran pembingkaihan berita pada pemberitaan penertiban lokalisi prostitusi dan perjudian Kalijodo oleh Pemprov DKI Jakarta pada Surat Kabar Pos Kota dan Warta Kota (edisi Februari) melalui Struktur Sintaksis, Skrip, Tematik, dan Retoris Pan dan Kosicki.
2. Mengetahui apakah ideologi mempengaruhi objektivitas pemberitaan penertiban lokasi prostitusi dan perjudian Kalijodo oleh Pemprov DKI Jakarta pada surat kabar Pos Kota dan Warta Kota (edisi Februari 2016).

#### **1.5.1 Kegunaan Teoritis dan Praktis**

##### **1.5.1 Kegunaan Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis pada khususnya, dan memberikan masukan maupun peningkatan pemahaman di bidang jurnalistik mengenai Pembingkaihan Berita atau *framing* bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi.



### 1.5.2 Kegunaan Praktisi

#### 1. Bagi Media

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berguna bagi surat kabar Pos Kota dan Warta Kota yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan saat menyikapi sebuah isu yang dituliskan kedalam bentuk pemberitaan

#### 2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat serta memberikan pengetahuan bahwa dalam pembuatan sebuah berita tidak terlepas dari ideologi media dan realitas yang dibawakan oleh media bukanlah yang sesungguhnya.

### 1.5.3 Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penelitian ini dibuat agar memudahkan serta memberikan gambaran singkat dan menyeluruh. Sistematika dalam penulisan pada penelitian ini terdiri dari lima bab, menjabarkan gambaran umum mengenai isi tiap bab, masing-masing bab dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah sehingga dapat ditarik judul “Analisis pembingkai berita tentang penertiban lokasi prostitusi dan perjudian Kalijodo oleh Pemprov DKI Jakarta di surat kabar Pos Kota dan Warta Kota (edisi Februari 2016)”. Dan beberapa sub bab yang

menguraikan fokus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini, penulis menjelaskan definisi konseptual dari judul penelitian dan teori-teori yang relevan, diantaranya : surat kabar, ideologi media, , framing, media massa, dan lain-lain.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang digunakan, subjek dan objek analisis, pendekatan penelitian dan sifat penelitian.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Bab ini memuat hasil analisis penelitian dan pembahasan yang menjawab masalah pokok dalam penelitian ini.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian serta saran yang digunakan sebagai bahan pertimbangan, masukan, dan perbaikan yang akan datang.